

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bencana merupakan peristiwa yang merugikan dan sudah melekat dengan kehidupan manusia, sesuai dengan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana, mengatakan bahwa bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Tidak terkecuali Indonesia, yang secara geografis merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, kemudian pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi ini sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Bahkan, menurut Arnold (1986) menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat (Syahroni, 2018, Agustus 23).

Selama periode tahun 2018, rentetan bencana melanda berbagai wilayah di Indonesia. Tercatat hingga 25 Oktober 2018, 1.999 kejadian bencana telah terjadi di Indonesia (Nugroho, 2018). Kejadian bencana yang terjadi tentu menimbulkan dampak yang besar, seperti korban jiwa, rusaknya infrastruktur, gangguan psikologis, dll. Salah satunya adalah bencana gempa bumi beruntun yang menimpa Pulau Lombok dan Sumbawa pada tanggal 29 Juli 2018, 5 Agustus 2018, dan 19 Agustus 2018 yang menyebabkan 564 orang meninggal dunia dan 445.343 orang mengungsi, serta kerugian ekonomi dicatat mencapai Rp 17,13 triliun (Nugroho, 2018). Kejadian ini menjadi peringatan bagi pemerintah maupun pihak-pihak lain untuk segera melakukan respon tanggap darurat bencana, dengan tujuan mengevakuasi dan membantu para korban untuk menciptakan kondisi yang aman dan lebih kondusif, serta untuk mengurangi atau mencegah bertambahnya korban. Tidak hanya pemerintah yang turut melakukan respon tanggap darurat bencana, banyak lembaga-lembaga kemanusiaan yang ikut serta dalam respon tanggap darurat gempa bumi yang terjadi di Lombok. Salah satunya adalah lembaga kemanusiaan yang berasal dari DIY yaitu YAKKUM Emergency Unit (YEU).

YAKKUM Emergency Unit (YEU) merupakan salah satu Non-Governmental Organization (NGO) yang bergerak dalam bidang respon tanggap bencana. YEU sendiri merupakan salah satu unit kerja YAKKUM (Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum) yang berdiri pada tahun 2001. Selain menjadi salah satu unit kerja YAKKUM, YEU juga merupakan anggota dari ACT Alliance, yang merupakan

jaringan gereja-gereja sedunia yang terdiri dari 139 organisasi berbasis gereja yang bekerja di lebih dari 140 negara dalam bidang kemanusiaan, pemberdayaan masyarakat, dan advokasi bagi keadilan masyarakat miskin. Pada gempa bumi yang melanda Lombok dan Sumbawa, YEU ikut dalam respon tanggap darurat hingga tanggal 25 Agustus 2018 atau saat masa tanggap darurat selesai. Kemudian dilanjutkan dengan masa rehabilitasi dan rekonstruksi, pada tahap ini YEU bekerjasama dengan lembaga lain untuk melakukan pendampingan bagi para penyintas gempa Lombok di 6 Dusun dampingan di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Penyintas merupakan masyarakat terdampak bencana yang memiliki itikad bahwa mereka harus bertahan dan bangkit dari kondisi bencana. Penyintas bencana gempa bumi adalah orang-orang yang berhasil survive dari bencana gempa bumi dan kemudian berusaha untuk bangkit kembali setelah mengalami bencana (Yuwanto, 2019).

Masa pendampingan ini merupakan salah satu pembangunan sosial pasca bencana, hal ini penting untuk dilakukan. Menurut Badri dalam pembangunan sosial pasca bencana adalah salah satu hal penting dan perlu dilakukan adalah aspek pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi penyintas. Pemberdayaan masyarakat disini bertujuan untuk mengembangkan partisipasi masyarakat terdampak dengan intervensi dari pihak luar, sehingga masyarakat ikut terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Pada penanganan bencana pasti akan melibatkan banyak pihak dari berbagai kalangan. Oleh karena itu, harus ada sistem

komunikasi yang berjalan baik agar kegiatan penanganan bencana dapat berjalan lebih baik (Badri, 2018, h.67). Rudianto juga menyatakan bahwa dalam penanggulangan bencana harus didukung dengan pendekatan *soft power* yang merupakan pendekatan dengan cara mempersiapkan kesiapsiagaan masyarakat untuk menghadapi suatu bencana dan *hard power* yang merupakan pendekatan dengan cara pembangunan fisik dalam upaya menghadapi bencana, seperti membangun sarana komunikasi, membangun tanggul, dll (Rudianto, 2015, h.52).

Pada masa pendampingan penyintas gempa Lombok, YEU memiliki program dengan isian kegiatan yang didesain dan diadaptasikan dengan kondisi lapangan, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat diterima dan ditindaklanjuti oleh para penerima manfaat. Kegiatan yang dilakukan pasca bencana atau pada masa rehabilitasi penting dilakukan untuk mengembalikan masyarakat korban bencana ke keadaan normal mereka. Menurut Soehatman dalam Lestari (2018), rehabilitasi merupakan perbaikan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama normalisasi atau berjalannya semua aspek pemerintah dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana secara wajar. Sedangkan, rekonstruksi merupakan program jangka menengah dan jangka panjang guna perbaikan fisik, sosial, dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelumnya. Pada tahap ini, pendekatan dan strategi komunikasi yang tepat akan mempercepat penyembuhan mental para korban bencana (Rudianto, 2015,

h.59). Dengan kata lain, pemilihan metode komunikasi yang tepat akan mempengaruhi berjalannya kegiatan pendampingan hingga tahap keberlanjutan program untuk seterusnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam menjalankan sebuah program, sebuah lembaga pasti akan melakukan perencanaan terlebih dahulu. Dalam hal ini adalah YEU sebagai pelaksana program akan membuat perencanaan program dan mengkaji peristiwa yang terjadi. Pada tahap perencanaan ini, perlu diketahui bagaimana proses awal hingga terbentuknya sebuah program yang telah disetujui oleh beberapa pihak yang bersangkutan. Selain itu, perlu dipertimbangkan juga siapa yang terlibat dan siapa yang dilibatkan dalam perencanaan ini, karena hal ini akan terkait dengan pelaksanaan program yang diharapkan dapat berguna dan membantu masyarakat, hingga tahap di mana masyarakat dapat kembali ke kehidupan normal mereka dan dapat lebih berkembang tanpa adanya pengaruh-pengaruh atau dampingan dari pihak-pihak lain.

Setelah itu, mengacu pada program yang sudah dirancang juga perlu dipertimbangkan metode komunikasi yang cocok dalam pelaksanaan kegiatan, terutama fokus dari YEU adalah pendampingan masyarakat pasca bencana yang dimana kondisi lingkungan dan psikologis penerima manfaat belum sepenuhnya kembali ke keadaan normal. Selain itu, YEU merupakan salah satu lembaga yang berasal dari luar daerah Lombok, sehingga sebisa mungkin mengadaptasikan diri dengan ruang lingkup kegiatan. Oleh karena itu, beberapa metode komunikasi dapat

diterapkan, namun karena program pasca bencana lebih fokus dalam pendampingan masyarakat dan pengurangan risiko bencana, sehingga metode komunikasi partisipatif lebih efektif untuk digunakan. Menurut Rahim (2004), komunikasi partisipatif merupakan suatu proses komunikasi dimana terjadi komunikasi dua arah atau dialogis, sehingga menghasilkan suatu pemahaman yang sama terhadap pesan yang disampaikan (Syarah dan Rahmawati, 2017, h.252). Sehingga, komunikasi partisipatif memungkinkan partisipan terlibat aktif dalam setiap kegiatan. Menurut Suparjan dkk (2003) dalam Syarah dan Rahmawati, keberhasilan sebuah kegiatan pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat akan ditentukan oleh komunikasi yang partisipatif, adanya komunikasi yang partisipatif memungkinkan anggota komunitas penerima program memiliki rasa tanggung jawab untuk keberlanjutan memberdayakan diri dan masyarakatnya serta dapat menggali potensi dan kreativitas masyarakat (Syarah dan Rahmawati, 2017, h.251). Pada penjelasan ini, partisipasi masyarakat merupakan suatu bentuk keterlibatan masyarakat secara langsung pada setiap kegiatan, sehingga dalam pendampingan masyarakat diletakkan sebagai subyek, dengan begitu masyarakat menjadi tidak ketergantungan pada pihak lain.

Komunikasi partisipatif menjadi penting pada situasi bencana, khususnya pada program pemberdayaan masyarakat terdampak bencana. Salah satunya adalah berkaitan dengan keefektifan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ada beberapa kasus bahwa masyarakat yang masih mengungsi belum tercukupi kebutuhan dasarnya. Seperti yang dilansir pada *Republika.co.id*, terkait gempa bumi yang

melanda Ambon, bahwa terkait dengan pemenuhan logistik, stok bahan pangan sudah cukup untuk kebutuhan satu bulan ke depan, namun untuk pemenuhan tenda atau terpal masih belum terpenuhi secara maksimal (Kartika, 2019, Oktober 7). Adanya komunikasi partisipatif dapat menghindarkan kejadian-kejadian seperti yang dijelaskan sebelumnya, karena komunikasi partisipatif dapat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat.

Komunikasi partisipatif juga membantu masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait kebencanaan. Hal ini menanggapi bahwa ada sebuah kasus bahwa masyarakat di sekitar wilayah Gunung Sitoli panik dan mengungsi ketika mendengar isu air laut surut dan berpotensi tsunami, dan faktanya ini merupakan hoaks (Rachman, 2019, Januari 10). Komunikasi partisipatif akan mendorong masyarakat memahami pesan dari lembaga, dengan partisipasi secara aktif dalam kegiatan.

Adanya komunikasi yang partisipatif memungkinkan anggota komunitas penerima program (partisipan) memiliki rasa tanggung jawab untuk keberlanjutan memberdayakan diri dan masyarakatnya serta dapat menggali potensi dan kreativitas masyarakat. Dengan komunikasi partisipatif, diharapkan partisipasi, potensi dan kreativitas masyarakat dapat lebih tergali dan juga diharapkan dapat mengembangkan aktivitas yang berorientasi pada kompetensi dan tanggung jawab sosial sebagai anggota komunitas itu sendiri.

Pemaparan di atas akan dikaitkan dengan program kerja YEU selama pendampingan di Bayan, Lombok Utara. Dalam sebuah program yang sudah dirancang pasti akan berisi kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi para penerima manfaat, kegiatan yang dilakukanpun dilaksanakan dengan cara-cara dan metode-metode yang berbeda, sesuai dengan tema kegiatan yang diangkat, namun kembali lagi terkait dengan penjelasan sebelumnya bahwa penelitian ini melihat bahwa komunikasi partisipatif menjadi salah satu metode komunikasi yang baik digunakan dalam pemberdayaan masyarakat seperti yang dilaksanakan oleh YEU. Selain itu, prinsip inti dari komunikasi partisipatif adalah adanya dialog yang bebas dan terbuka (Tuft & Mefalupos, 2009). Sehingga, metode komunikasi partisipatif jika diterapkan dalam kegiatan pendampingan YEU akan memungkinkan masyarakat untuk lebih terbuka dan lebih leluasa dalam menyampaikan atau memaparkan apa yang ada di benak mereka, dan tentunya sesuai dengan tema kegiatan yang sedang dilakukan. Tidak hanya itu, komunikasi partisipatif juga dapat menjangkau dan memastikan bahwa kelompok yang terpinggirkan memiliki forum untuk menyuarakan keprihatinan mereka, terlibat dalam debat publik dan menyelesaikan masalah.

Terlepas dari sebuah metode penyampaian pesan, komunikasi partisipatif juga sangat berorientasi pada sebuah tindakan, sebagai unsur penting dari komunikasi partisipatif, proses pemberdayaan didasarkan pada refleksi masalah, tetapi juga pada integrasi tindakan. Hasil utama dari komunikasi partisipatif adalah artikulasi

peningkatan kesadaran dan komitmen untuk bertindak. Pertama dan terutama, ini menjadi proses pemberdayaan bagi masyarakat yang terlibat yang merasakan komitmen dan rasa memiliki terhadap masalah tersebut (Tuftte & Mefalopulos, 2009, h.11). Jadi, apabila dikaitkan dengan program pendampingan YEU yang merupakan sebuah respon tanggap bencana, sebuah perubahan sangat dibutuhkan oleh para penyintas untuk kembali ke kehidupan normal mereka, walaupun efek yang timbul tidak akan langsung. Perubahan ini dapat dirasakan mulai dari tindakan langsung dari pihak-pihak yang bersangkutan. Sehingga, pada tahap ini YEU dengan program-program yang dijalankan memberikan perubahan kepada para penerima manfaat yang dijangkau.

Penelitian ini akan lebih menekankan bagaimana YEU sebagai salah satu lembaga kemanusiaan yang melakukan respon bencana pasca gempa bumi Lombok memosisikan diri sebagai fasilitator dan sekaligus menjadi mediator bagi para penyintas untuk berkembang dan bangkit dari kondisi bencana yang telah melanda mereka sebelumnya. Cara penyampaian pesan dan metode komunikasi yang digunakan akan mempengaruhi keberhasilan program-program YEU yang dilaksanakan berdampingan dengan masyarakat langsung. Hal inilah yang menarik penulis untuk menelaah lebih dalam mengenai metode komunikasi yang digunakan YEU dalam kegiatan pendampingan penyintas pasca gempa Lombok. Dengan dibuatnya sebuah program pendampingan pasca bencana, penulis ingin melihat bagaimana cara YEU masuk dan beradaptasi ke dalam komunitas yang memiliki

perbedaan kebiasaan dan kebudayaan. Penyampaian pesan menggunakan metode komunikasi yang sesuai seperti yang dijelaskan di atas merupakan salah satu poin penting penulis untuk melakukan sebuah penelitian.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengangkat fenomena ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul, “Komunikasi Partisipatif dalam Pendampingan Masyarakat YAKKUM Emergency Unit bagi Para Penyintas Pasca Gempa Lombok 2018”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana komunikasi partisipatif dijalankan dalam pendampingan masyarakat YAKKUM Emergency Unit bagi para penyintas gempa Lombok 2018?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui komunikasi partisipatif dijalankan dalam pendampingan masyarakat YAKKUM Emergency Unit bagi para penyintas gempa Lombok 2018

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu karya baru yang dapat mendukung dalam pengembangan ilmu pengetahuan yaitu ilmu komunikasi dan penelitian ini juga dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan komunikasi partisipatif dalam situasi bencana.

2. Manfaat Praktis

Bagi YAKKUM *Emergency Unit*, penelitian ini bermanfaat sebagai tinjauan dalam pelaksanaan pendampingan masyarakat di program-program selanjutnya.

E. Kerangka Teori

Pada tahapan ini, peneliti menggunakan tiga teori yang digunakan sebagai acuan dan pondasi berpikir dalam melakukan penelitian. Teori-teori yang digunakan juga menjadi dasar ilmiah peneliti dalam melakukan sebuah analisis untuk temuan-temuan penting dari penelitian yang dilakukan. Teori yang digunakan meliputi komunikasi bencana dan komunikasi partisipatif, serta komunikasi partisipatif dalam situasi bencana.

Tiga teori di atas digunakan peneliti sebagai landasan penelitian karena sesuai dengan topic penelitian yang ingin mengkaji sebuah peristiwa bencana gempa Lombok pada tahun 2018, yang dimana peneliti lebih fokus terhadap respon tanggap bencana yang dilakukan oleh YAKKUM *Emergency Unit* dengan program dan kegiatan pendampingan masyarakat pasca bencana. Dalam suatu kegiatan, komunikasi menjadi hal penting untuk membangun sebuah dinamika antara peserta dan pelaksana kegiatan. Hal ini juga berhubungan dengan komunikasi yang memiliki dimensi isi dan dimensi hubungan, yang dimana dimensi ini diartikan secara verbal, sementara dimensi hubungan disandi secara nonverbal. Dimensi isi ini menunjukkan sebuah muatan komunikasi, yang berarti apa yang dikatakan. Sedangkan dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakannya yang juga mengisyaratkan bagaimana hubungan para peserta komunikasi itu, dan bagaimana seharusnya pesan

itu ditafsirkan (Mulyana, 2016). Hal ini mengartikan bahwa dalam setiap kegiatan penyampaian pesan harus dilakukan secara jelas dan menggunakan metode yang cocok agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dari pesan yang disampaikan. Komunikasi partisipatif digunakan peneliti sebagai salah satu teori yang digunakan untuk penelitian, karena komunikasi partisipatif merupakan suatu proses komunikasi yang dimana terjadi komunikasi dua arah atau dialogis, sehingga dapat menghasilkan suatu pemahaman yang sama terhadap pesan yang disampaikan (Syarah dan Rahmawati, 2017, h.252). Penelitian ini ingin melihat bagaimana YEU sebagai lembaga kemanusiaan yang melakukan pendampingan masyarakat melakukan aktivitas atau menjalankan program dengan melibatkan langsung masyarakat itu sendiri. Kemudian bagaimana strategi YEU untuk menyampaikan pesan secara efektif kepada target sasaran yang mereka tuju.

Setelah itu, selain komunikasi partisipatif peneliti juga menggunakan komunikasi bencana sebagai teori yang menjadi landasan melakukan penelitian. Komunikasi bencana dibutuhkan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kesiapsiagaan bencana, serta mitigasi bencana (Moorthy, Benny, & Gill, 2018, hal 54). Pernyataan di atas berkaitan dengan program-program yang dilaksanakan oleh YEU yang bertugas di Lombok, khususnya Bayan, Lombok Utara pasca gempa bumi. Seperti penelitian ini yang ingin melihat komunikasi yang terjadi pada periode saat bencana, pasca bencana, dan pra bencana, karena komunikasi bencana tidak hanya relevan pada kondisi saat terjadi bencana saja.

Kemudian, selanjutnya adalah komunikasi partisipatif dalam situasi bencana digunakan untuk menghubungkan kedua teori dengan topik penelitian yang berfokus pada kondisi bencana. Pada tahap ini, peneliti berfokus pada partisipasi masyarakat dalam kaitan kondisi pasca bencana atau rehabilitasi dan rekonstruksi. Partisipasi masyarakat disini sangat dibutuhkan untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi. Mereka berpartisipasi dalam menetapkan tujuan, mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi rencana serta program yang akan dijalankan

a. Komunikasi Partisipatif

Komunikasi partisipatif awal mulanya dikenalkan di dalam sebuah seminar di Amerika Latin tahun 1978, kemudian Paulo Freire mencetuskan sebuah konsep komunikasi partisipatif bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk menyuarakan kata-katanya, baik secara individu maupun bersama-sama (Muchtar, 2016, h.21). Komunikasi partisipatif merupakan sebuah proses komunikasi dua arah atau dialogis sehingga dapat menghasilkan suatu pemahaman yang sama terhadap pesan yang disampaikan (Syarah dan Rahmawati, 2017, h.252). Pada komunikasi partisipatif juga sering dijumpai istilah “komunikasi pembangunan partisipatif” yang sering digunakan untuk menarik perhatian pada penekanan pada proses komunikasi dua arah, dan untuk menjauhkan dari pendekatan komunikasi satu arah yang melibatkan penyebaran pesan, pengiriman informasi, atau membujuk orang untuk mengubah perilaku mereka (Srampickal, 2006, h.6). Pernyataan di atas menunjukkan bahwa komunikasi partisipatif merupakan komunikasi dua arah yang berarti ada hubungan timbal balik antara komunikator dengan *audience*. Komunikasi dua arah ini

berhubungan dengan konseptualisasi komunikasi yaitu komunikasi sebagai interaksi. Menurut Mulyana (2016), pandangan komunikasi sebagai interaksi menyetarakan komunikasi dengan proses sebab-akibat atau aksi-reaksi, yang arahnya bergantian. Salah satu keunikan dari komunikasi sebagai interaksi adalah adanya unsur umpan balik, yakni apa yang disampaikan penerima pesan kepada sumber pesan. Suatu pesan disebut umpan balik apabila hal itu merupakan respon terhadap pesan pengirim dan bila mempengaruhi perilaku selanjutnya pengirim. Sehingga, tidak semua respon penerima pesan itu merupakan sebuah umpan balik (Mulyana, 2016).

Menurut Uphoff dalam Srampickal, secara umum ada empat cara partisipasi yang berbeda dalam sebuah pembangunan dan bersifat partisipatif.

- a. Partisipasi dalam implementasi, yang berarti masyarakat didorong untuk aktif dan mengambil bagian dalam aktualisasi proyek. Mereka diberi tanggung jawab tertentu pada tugas-tugas sesuai dengan sumber daya yang ditentukan.
- b. Partisipasi dalam evaluasi, jadi masyarakat juga melakukan evaluasi terhadap proyek yang mereka lakukan, untuk mengkritik keberhasilan atau kegagalannya.
- c. Partisipasi dalam tunjangan, yang berarti disini masyarakat ikut andil dalam menikmati hasil-hasil yang telah mereka buat.
- d. Partisipasi dalam pengambilan keputusan, masyarakat dituntut untuk berinisiatif, berdiskusi, membuat konsep, dan merencanakan kegiatan yang akan mereka lakukan sebagai sebuah komunitas (Srampickal, 2006, h.8)

Jadi, dari penjelasan di atas dalam konsep partisipatif masyarakat dituntut untuk ikut serta langsung dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Keikutsertaan

disini bukan hanya menjadi seorang peserta, melainkan ikut aktif menjalankan kegiatan tersebut di setiap elemen kegiatan.

Prinsip inti dari komunikasi partisipatif menurut Tufte dan Mefalopulos (2009) adalah terjadinya dialog yang bebas dan terbuka. Prinsip ini menjadi sebuah pilar terjadinya dinamika yang seimbang dalam sebuah aktivitas komunikasi partisipatif. Kemudian, buah yang dihasilkan dari komunikasi partisipatif adalah artikulasi peningkatan kesadaran dan komitmen untuk bertindak. Hal ini menjadi proses pemberdayaan bagi masyarakat yang terlibat menjadi merasakan komitmen dan rasa memiliki terhadap apa yang sedang mereka kerjakan (Tufte & Mefalopulos, 2009).

Komunikasi partisipatif juga erat hubungannya dengan sebuah konsep pemberdayaan (*empowerment*). Menurut Rahim (2004) dalam Satriani dkk, ada empat konsep terkait komunikasi partisipatif yang mendorong terbangunnya pemberdayaan. Konsep-konsep tersebut sebagai berikut:

a. Heteroglasia

Konsep ini menjelaskan bahwa setiap sistem pembangunan selalu dilandasi oleh berbagai kelompok dan komunitas yang berbeda-beda dengan berbagai variasi ekonomi, sosial, dan faktor budaya yang saling mengisi satu sama lain. Heteroglasia ini sendiri menjadi tantangan bagi komunikasi partisipatif, karena harus menempatkan konsep tersebut untuk kepentingan publik, bagaimana menghubungkan ideologi-ideologi dan kelompok yang berbeda-beda atau variasi sudut pandang yang berbeda-beda tanpa menekan salah satu pandangan.

b. Dialog

Dialog merupakan sebuah komunikasi transaksional dengan pengirim dan penerima pesan saling berinteraksi dalam suatu periode waktu tertentu hingga sampai pada makna-makna yang saling berbagi. Dalam dialog setiap orang memiliki hak yang sama untuk berbicara atau untuk didengar, dan diharapkan suaranya tidak ditekan atau disatukan dengan suara orang lain. Karena esensi dari dialog adalah mengenal dan menghormati pembicara lain, atau suara lain, sebagai subyek yang otonom, tidak lagi sebagai obyek komunikasi saja.

c. Poliponi

Poliponi merupakan bentuk tertinggi dari suatu dialog dimana suara-suara yang tidak selaras dan terpisah menjadi lebih terbuka, sehingga dapat memperjelas satu sama lain, dan tidak menutupi satu sama lain. Hal itu menjadi bentuk ideal dari sebuah komunikasi partisipatif, yang dimana suara-suara yang berbeda dapat disadari secara kolektif dengan menghubungkan berbagai perlakuan konstruksi umum komunitas.

d. Karnaval

Pada konsep ini, proses dilakukan secara tidak formal dan biasa juga diselingi oleh humor dan canda tawa. Anggota komunitas didorong untuk berpartisipasi dalam karnaval secara bebas. Bahasa dan gaya dari komunikasi karnaval selalu berdasarkan pengalaman khalayak yang tidak dimediasi, menggunakan kosakata yang umum, fantastik, dan berbau pengalaman dari mereka (Satriani dkk, 2011, h.19).

Komunikasi partisipatif menjadi sebuah teori yang mengutamakan proses komunikasi secara dua arah dan adanya hubungan timbal balik antara komunikator dengan komunikan, sehingga dinamika yang berjalan selama proses komunikasi tidak memberatkan satu pihak saja, melainkan saling berinteraksi dan bebas dalam berekspresi. Komunikasi partisipatif tidak menutup kemungkinan bahwa komunikan memiliki tugas-tugas dan ikut andil dalam proses komunikasi yang berjalan.

b. Komunikasi Bencana

Komunikasi bencana merupakan proses pembuatan, pengiriman, dan penerimaan pesan oleh satu orang atau lebih, secara langsung maupun melalui media, dalam konteks kebencanaan pada saat prabencana, saat terjadi bencana, pasca bencana dan menimbulkan respons ataupun umpan balik (Lestari, 2018). Menurut Rudianto (2015), komunikasi bencana merupakan komunikasi dalam bencana yang tidak hanya dibutuhkan dalam kondisi darurat bencana, tapi juga penting pada saat pra bencana (Rudianto, 2015, h.59). Selain itu, komunikasi bencana merupakan sebuah penyampaian pesan terkait dengan menyiapkan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana melalui konstruksi pengetahuan/nilai lokal mereka tentang bencana itu penting (Fatanti, Rahmiati, dan Yustisia, 2019, h.88).

Jika dikaitkan dengan bencana, komunikasi bisa digunakan sebagai radar sosial yang memberi kepastian kepada pihak lain mengenai adanya bencana di suatu

tempat. Radar sosial yang dimaksudkan, yaitu memancarkan informasi ke berbagai pihak untuk pengurangan risiko bencana (Lestari, 2018). Pengurangan risiko bencana merupakan konsep dan praktik mengurangi risiko-risiko bencana melalui upaya-upaya sistematis untuk menganalisis dan mengelola faktor-faktor penyebab bencana, termasuk di dalamnya melalui pengurangan kerentanan penduduk terhadap ancaman bahaya, pengurangan kerentanan penduduk dan harta benda, pengelolaan lahan dan lingkungan secara bijak dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap peristiwa-peristiwa merugikan (Lestari, 2018). Komunikasi selama dan sesaat setelah terjadi bencana merupakan komponen penting dari respons dan pemulihan, karena menghubungkan orang yang terkena dampak, keluarga, dan masyarakat dengan responden pertama. Komunikasi bencana menjadi bagian penting dari manajemen bencana, yang dimana manajemen bencana merupakan sekumpulan kebijakan dan keputusan-keputusan administratif dan aktivitas-aktivitas operasional yang berhubungan dengan berbagai tahapan dari semua tingkatan bencana. Sebab, pada bencana pasti akan ada masa pemulihan dan kondisi masyarakat pasca bencana akan lebih solid bila mencoba membangun manajemen bencana, agar situasi kehidupan normal dapat diciptakan dengan rentang waktu yang lebih cepat (Badri, 2018, h. 71-72). Suatu manajemen komunikasi bencana bertujuan untuk mengelola bencana dengan baik dan aman. Manajemen komunikasi bencana dibangun dengan koordinasi berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan bencana. Pelaksanaan manajemen komunikasi bencana terdiri dari perencanaan, pengorganisasian atau koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi (Lestari, dkk, 2013, h.144). Keterlibatan dan

koordinasi pihak-pihak yang berwenang seperti pemerintah, lembaga berwenang, masyarakat, LSM, donatur dan relawan dalam manajemen komunikasi bencana sangat dibutuhkan guna membangun suatu komunikasi bencana yang dapat dipahami makna dari pesan yang disampaikan sehingga menghasilkan umpan balik yang sesuai dengan tujuan awal (Lestari, dkk, 2013, h.141).

Dalam respon bencana, komunikasi bencana yang efektif adalah komunikasi yang dilakukan tidak hanya saat tanggap darurat, melainkan juga pada saat prabencana atau kesiapsiagaan, serta setelah bencana atau masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebagai sebuah indeks keberhasilan suatu upaya pengurangan risiko bencana yaitu dengan adanya komunikasi yang baik dari pemangku kepentingan yang ikut berpartisipasi untuk kegiatan penanggulangan bencana (Lestari, 2018). Hal serupa juga dikatakan oleh Rudianto, bahwa komunikasi dalam bencana tidak saja dibutuhkan dalam kondisi darurat bencana, melainkan penting pada masa pra bencana. Mempersiapkan masyarakat di daerah rawan bencana tentu harus senantiasa dilakukan. Selain informasi yang memadai tentang potensi bencana di suatu daerah, pelatihan dan internalisasi kebiasaan menghadapi situasi bencana juga harus dilakukan secara berkala (Rudianto, 2015, h.59). Komunikasi yang efektif pada masa penanggulangan bencana dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini juga dijelaskan oleh Moorthy, Benny, dan Gill, bahwa manajemen informasi dari para pemangku kepentingan di dalam situasi bencana merupakan hal yang mendasar dalam upaya

mitigasi bencana. Pertukaran informasi yang efisien menjadi komponen yang vital dalam respon kebencanaan, hal ini didasarkan dari gagasan bahwa informasi yang tepat harus tersedia sebelum, sesaat dan setelah bencana (Moorthy, Benny, & Gill, 2018, h.52). Cara menyampaikan informasi juga harus dilakukan dengan tepat. Kekeliruan dalam mengkomunikasikan sebuah informasi dapat menimbulkan ketidakpastian yang dapat memperburuk situasi. Pada situasi ini, pendekatan komunikasi budaya dan lintas budaya amat dibutuhkan (Rudianto, 2015, h.59).

Menurut Sumardjo dalam (Badri, 2018, h. 67), pada pembangunan sosial pasca bencana, hal yang perlu diperhatikan adalah aspek pemberdayaan masyarakat khususnya untuk korban bencana. Pemberdayaan masyarakat yaitu sebuah proses pengembangan partisipasi aktif masyarakat dan dengan intervensi dari pihak luar yang minimal, baik dalam mengidentifikasi kebutuhan, mengidentifikasi pilihan strategis, keputusan atau tindakan, memobilisasi sumber-sumber, maupun menggerakkan tindakan untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya. Intervensi pihak luar yang berlebihan dan tidak proporsional hanya akan menyebabkan ketidakberdayaan pada masyarakat, karena tidak terjadi proses pembelajaran diri atau proses pemberdayaan pada masyarakat itu sendiri.

Komunikasi dalam penanganan bencana memerlukan komunikasi sosial yang melibatkan masyarakat. Menurut Wilbur Schram dalam Lestari (2018), ada empat fungsi komunikasi sosial:

a. Komunikasi sebagai radar sosial

Komunikasi sebagai radar sosial diartikan sebagai sebuah pemaparan informasi terkait dengan peristiwa yang berhubungan dengan komunitas sosialnya, seperti komunikasi dalam kebencanaan, adanya komunikasi sebagai radar sosial diharapkan mampu untuk menjadi perpanjangan tangan pemerintah berwenang untuk menginformasikan atau mewaspadaikan suatu bencana. Berkaca dari kejadian-kejadian bencana yang terjadi, banyak dari kalangan masyarakat yang ikut aktif berperan dalam membantu para masyarakat yang terkena bencana, selain itu banyak publik figure, *influencer*, artis, dll yang turut membantu juga. Hal ini menandakan bahwa radar sosial dapat digunakan untuk situasi genting sekalipun, tak terkecuali dalam membantu penyintas bencana.

b. Komunikasi sebagai Manajemen

Komunikasi sosial berfungsi sebagai dasar sebuah tindakan atau kegiatan komunikasi yang menjadi alat untuk mengatur atau mengendalikan anggota komunitas dan anggota ini mengetahui apa yang diharapkan oleh pihak lain terhadap dirinya dalam hidup bermasyarakat. Sehingga disini komunikasi juga berfungsi sebagai manajemen yang merupakan sebuah proses pengoordinasian sesuatu.

c. Komunikasi sebagai Sarana Sosialisasi

Kegiatan komunikasi untuk menyampaikan pengetahuan atau pendidikan bagi warga ataupun generasi baru dalam kehidupan masyarakat merupakan sebuah proses dari sosialisasi. Sarana sosialisasi disini lebih mengarah ke sebuah edukasi

atau memberi informasi terkait dengan memberikan pengertian dan pemahaman terhadap suatu fenomena, serta untuk mendorong partisipasi dari masyarakat. Dalam konteks bencana, sosialisasi tentang kebencanaan kepada masyarakat merupakan salah satu hal yang penting untuk dilakukan, dan tentunya bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang profesional pada bidang kebencanaan.

d. Komunikasi sebagai Media Hiburan

Situasi bencana dan pasca bencana pasti akan memberikan dampak bagi para penyintas, seperti ketegangan hidup karena kehidupan mereka tidak seperti kehidupan normal mereka sebelumnya, namun pada tahap ini media komunikasi juga berfungsi untuk menghibur masyarakat. Pada komunikasi bencana diperlukan keahlian dan kemampuan komunikasi yang tak sekedar menyampaikan pesan bencana secara meluas, melainkan juga diperlukan kemampuan membentuk semangat untuk berbagi dengan penuh empati. Jadi, seorang komunikator dapat mengetahui kondisi psikis dan mental para penyintas pasca bencana, sehingga komunikator dapat memberikan hiburan yang dinilai dapat membuat penyintas terbangun dan tidak terlarut dalam kesedihan (Lestari, 2018).

Dalam komunikasi bencana juga terdapat komunikasi risiko bencana yang merupakan kegiatan yang sangat penting bagi mobilisasi masyarakat untuk pengurangan risiko bencana, komunikasi risiko bencana juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya tentang risiko bencana dan cara perlindungan. Pendekatan komunikasi dan pembelajaran di antara mitra tingkat lokal digambarkan sebagai komunikasi risiko bencana. Tujuan

utama dari komunikasi risiko bencana adalah untuk meningkatkan kesadaran anggota masyarakat dan kelompok sosial lainnya tentang risiko bencana dan tindakan yang diambil untuk mengatasinya. Selain itu terdapat tujuan spesifik dari komunikasi risiko bencana:

- a. Memfasilitasi pertukaran informasi untuk memahami sifat dan persepsi risiko
- b. Mengembangkan sikap saling pengertian tentang masalah bencana
- c. Merumuskan pendekatan umum untuk masalah risiko
- d. Mendorong tindakan-tindakan spesifik oleh masyarakat untuk kesiapsiagaan bencana (Kafle & Murshed, 2006).

Komunikasi bencana digunakan sebagai radar sosial yang memberi kepastian kepada pihak lain mengenai adanya bencana maupun ancaman bencana di suatu tempat baik pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Selain itu, komunikasi bencana juga memuat tentang komunikasi risiko bencana yang di dalamnya merupakan pengurangan risiko bencana yang bertujuan untuk menganalisis dan mengelola faktor-faktor apa saja yang dibutuhkan untuk menghindari bahaya dalam bencana atau upaya mitigasi bencana.

c. Komunikasi Partisipatif dalam Situasi Bencana

Teori yang selanjutnya erat kaitannya dengan dua teori sebelumnya, yaitu komunikasi partisipatif dalam situasi bencana. Komunikasi partisipatif itu sendiri diartikan sebagai sebuah pendekatan yang didasarkan pada dialog, yang memungkinkan terjadinya sebuah pertukaran informasi, persepsi dan pendapat di antara berbagai pemangku kepentingan, sehingga dengan demikian akan

memudahkan dalam memfasilitasi pemberdayaan, terutama bagi mereka yang paling rentan dan terpinggirkan. Komunikasi partisipatif bukan hanya berbicara tentang pertukaran informasi dan pengalaman, melainkan terkait dengan eksplorasi dan generasi pengetahuan baru yang ditujukan untuk mengatasi situasi yang perlu ditingkatkan (Tufte & Mefalopulos, 2009). Kemudian, berhubungan dengan komunikasi partisipatif adalah adanya partisipasi masyarakat, dalam konteks ini adalah para masyarakat yang terdampak dan bertahan hidup setelah bencana melanda. Partisipasi masyarakat, umumnya, mengacu pada keterlibatan orang dalam proyek apa pun untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri atau untuk mengembangkan kondisi sosial ekonomi mereka. Mereka berpartisipasi dalam menetapkan tujuan, mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi rencana serta program yang akan dijalankan. Hal ini diperkuat oleh studi yang dilakukan Zamir (2006) dalam Ali dkk, yang menunjukkan bahwa manajemen bencana di Bangladesh memerlukan pendekatan berbasis masyarakat. Oleh karena itu, peristiwa bencana harus dihadapi dengan rencana dan program yang tepat di mana partisipasi aktif orang-orang yang terkena dampak harus dipastikan dalam upaya untuk mengurangi kerusakan harta benda dan untuk meminimalkan rasa sakit dan penderitaan orang-orang yang terdampak, serta untuk mempercepat proses pembangunan berkelanjutan (Ali dkk, 2016, h.463).

Berhubungan dengan bencana, pasti ada upaya pengurangan risiko bencana. Pada manajemen pengurangan risiko bencana bukan hanya kapasitas pemerintah saja, melainkan partisipasi dari multi pemangku kepentingan adalah hal yang

efektif. Berdasarkan laporan UNDP tahun 2004 tentang pengurangan risiko bencana menyatakan bahwa tujuannya adalah membentuk masyarakat sipil yang kuat dan negara yang kuat. Partisipasi komunitas lokal sangat penting untuk memahami kebutuhan lokal dan memberdayakan orang untuk mengatasi kebutuhan tersebut. Sehingga, pelajaran penting dari pekerjaan tanggap darurat bencana adalah pengetahuan yang memperhitungkan kerentanan dan kapasitas komunitas lokal sebagai unsur penting untuk perencanaan pengurangan risiko bencana yang efektif (Zubir & Amirrol, 2011, h.197). Hal ini juga dicetuskan oleh Lestari (2018), bahwa kunci keberhasilan dari sebuah upaya pengurangan risiko bencana adalah adanya komunikasi yang baik dari *stakeholders* yang ikut berpartisipasi untuk kegiatan penanggulangan bencana. *Stakeholders* yang dimaksud adalah pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Komunikasi yang baik dan efektif dapat memberikan manfaat yang efektif dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Partisipasi masyarakat dalam bencana diwujudkan dalam kegiatan yang nyata. Jadi, hal ini lebih bersifat membangun kesadaran masyarakat, dimana masyarakat akan menjadi paham, siap siaga, dan terlatih dalam mengelola kerentanan, kerawanan dan risiko yang akan dihadapi (Edyanto, 2014, h.29). Hal ini berhubungan dengan mitigasi bencana yang merupakan salah satu bagian dari upaya pengurangan risiko bencana. Upaya mitigasi bencana sendiri bertujuan untuk menggali partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, baik dalam proses identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan, maupun evaluasi berbagai kegiatan penanggulangan bencana (Susanti

& Khotimah, 2016, h.67). Sehingga, upaya mitigasi bencana yang diterapkan adalah berbasis masyarakat, karena masyarakat itu sendiri yang mengenali situasi dan ancaman-ancaman bencana di lingkungan mereka tinggal.

Tufte dan Mefalopulos (2009) melihat dari perspektif kelembagaan, ada empat tahap kunci dari sebuah proyek pengembangan:

a. Tahap Penelitian

Tahap ini merupakan fase dimana tempat masalah dari pengembangan didefinisikan secara akurat. Pada tahap ini semua pemangku kepentingan yang relevan dapat dilibatkan. Penelitian yang dilakukan dapat mencakup mempelajari pengalaman sebelumnya, melihat pengetahuan dan sikap individu dari masyarakat, dll.

b. Tahap Desain

Tahap ini mendefinisikan aktivitas secara aktual. Pendekatan partisipatif membantu mengamankan kepemilikan dan komitmen masyarakat yang terlibat. Partisipasi aktif oleh warga setempat dan pemangku kepentingan lainnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi intervensi yang disarankan.

c. Tahap Implementasi

Tahap ini merupakan sebuah pelaksanaan dari intervensi yang telah direncanakan. Partisipasi dalam tahap ini berguna untuk meningkatkan komitmen, relevansi, dan keberlanjutan.

d. Tahap Evaluasi Partisipasi

Tahap ini memastikan bahwa perubahan yang paling menonjol dari intervensi yang dilakukan dibawa ke perhatian umum dan dinilai. Untuk membentuk sebuah evaluasi yang berarti, indikator dan pengukuran harus didefinisikan dalam proses partisipatif dari awal inisiatif dari intervensi yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan.

Pada situasi bencana, dalam memulai sebuah proyek atau program pendampingan masyarakat, perlu melihat persepsi partisipasi yang berbeda untuk diidentifikasi. Hal ini akan berguna untuk mengklarifikasi persepsi partisipasi apa yang akan memandu strategi secara konseptual. Tufted and Mefalopulos mengidentifikasi empat persepsi sebagai berikut:

a. Partisipasi Pasif

Partisipasi pasif merupakan sebuah konsep yang paling tidak partisipatif dari keempat pendekatan. Pada pendekatan ini pemangku kepentingan utama dari suatu proyek berpartisipasi dengan diberi tahu tentang apa yang akan terjadi dan telah terjadi, namun umpan balik dari orang minimal atau tidak ada

b. Partisipasi melalui Konsultasi

Partisipasi ini merupakan sebuah proses ekstraktif, di mana pemangku kepentingan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh para pakar luar, namun di analisis akhir, proses konsultatif ini membuat semua kekuatan pengambilan keputusan hanya berada di tangan para profesional eksternal yang tidak berkewajiban pada pemangku kepentingan.

c. Partisipasi melalui Kolaborasi

Pada partisipasi membentuk kelompok kepentingan utama untuk berpartisipasi dalam diskusi dan analisi tujuan yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh proyek. Tingkat partisipasi ini biasanya tidak menghasilkan perubahan dramatis dalam apa yang harus dicapai, yang seringkali sudah ditentukan, tetapi untuk memenuhi hal tersebut, diperlukan partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan tentang bagaimana cara untuk mencapai tujuan bersama. Ini akan menggabungkan atau mengkolaborasikan semua keputusan dari semua komponen pemangku kepentingan dengan fasilitator dan pakar luar.

d. Partisipasi Pemberdayaan

Tingkat partisipasi ini memungkinkan para pemangku kepentingan utama mampu dan mau memulai proses serta mengambil bagian dari analisis. Ini mengarah pada pengambilan keputusan bersama tentang apa yang harus dicapai dan bagaimana cara untuk mencapainya. Sementara orang luar disini hanya merupakan mitra dalam proyek, namun masyarakat itu sendiri yang menjadi pemangku kepentingan utama dalam proyek. Pada tingkatan ini, dialog mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu penting, dan pertukaran pengetahuan dan pengalaman mengarah pada solusi. Kepemilikan dan kendali proses berada di tangan pemangku kepentingan utama. (Tufte & Mefalopulos, 2009).

Komunikasi partisipatif dalam situasi bencana bertujuan untuk melihat partisipasi masyarakat dalam proyek apapun untuk menyelesaikan masalah mereka terutama terkait dengan mengembalikan kehidupan normal mereka setelah bencana

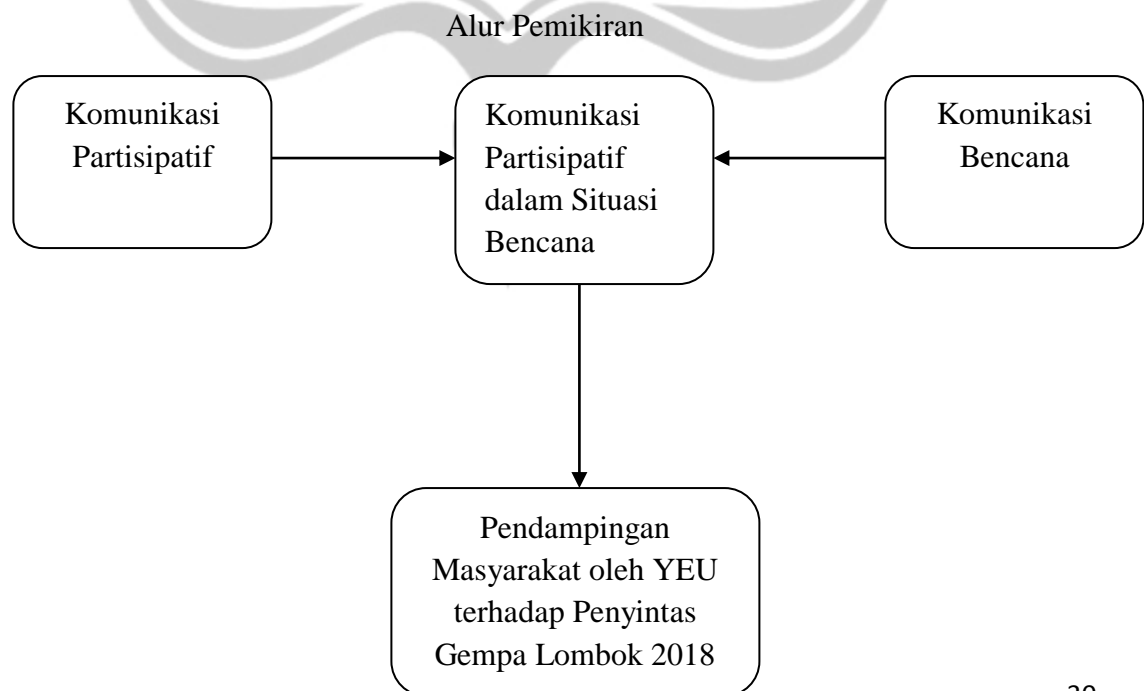
melanda. Partisipasi masyarakat pada teori ini bersifat nyata, sehingga masyarakat akan sadar dan paham, serta memiliki kewajiban untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana.

F. Kerangka Konsep

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan konsep penelitian secara lebih mendalam. Kerangka konsep atau kerangka pemikiran peneliti ini mengacu dari kerangka teori yang digunakan peneliti untuk menjadi dasar penelitian, yang nantinya dari kerangka teori tersebut akan membentuk kerangka berpikir peneliti dalam mengkaji “Komunikasi Partisipatif dalam Kegiatan Pendampingan Masyarakat YAKKUM Emergency Unit bagi Para Penyintas Pasca Gempa Lombok 2018”. Paulo Freire mencetuskan sebuah konsep komunikasi partisipatif bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk menyuarakan kata-katanya, baik secara individu maupun bersama-sama (Muchtar, 2016, h.21). Sehingga, peneliti ingin melihat pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh YEU terhadap penyintas gempa Lombok 2018 menggunakan sudut pandang komunikasi partisipatif, karena pada komunikasi partisipatif itu dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat dapat mendorong partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Sehingga sebuah proyek kemanusiaan seperti pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh YEU ini merupakan sebuah proyek yang berbasis masyarakat dengan adanya komunikasi partisipatif ini. Kemudian, karena pendampingan masyarakat YEU merupakan salah satu bentuk dari respon bencana, khususnya pada

kondisi pasca bencana atau pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi, maka peneliti menggunakan komunikasi bencana untuk membantu peneliti dalam membentuk kerangka berpikir. Pada komunikasi bencana juga mencakup komunikasi sosial yang dalam perspektif kebencanaan sangat dibutuhkan agar semua masyarakat yang terdampak bencana maupun relawan dan pemerintah serta semua pihak mampu berpikir, bersikap, dan berperilaku secara positif (Lestari, 2018). Setelah itu, ada komunikasi partisipatif dalam situasi bencana yang merupakan salah satu kerangka teori yang digunakan oleh peneliti. Komunikasi partisipatif dalam situasi bencana jika dikaitkan dengan topik penelitian yaitu menggambarkan sebuah partisipasi dari para penyintas gempa Lombok dalam kegiatan-kegiatan berdampingan dengan YEU. Selanjutnya kerangka teori akan dibahas secara mendalam lagi agar menjadi relevan dengan penelitian ini dan akan memunculkan sebuah alur pemikiran.

Bagan 1.1 Alur Pemikiran



Bagan 1.1 menjelaskan tentang alur berpikir peneliti berdasarkan dengan teori-teori yang digunakan untuk mengungkapkan topik penelitian dengan teori yang ada. Berikut merupakan uraian kerangka konsep penelitian.

a. Komunikasi Partisipatif

Komunikasi partisipatif merupakan sebuah proses komunikasi dua arah atau dialogis sehingga dapat menghasilkan suatu pemahaman yang sama terhadap pesan yang disampaikan (Syarah dan Rahmawati, 2017, h.252). Jadi, komunikasi partisipatif disini tidak bersifat satu arah melainkan dua arah, sehingga dinamika dalam sebuah proses kegiatan akan lebih hidup karena tidak hanya menggunakan satu sudut pandang saja, melainkan juga memperhitungkan sudut pandang yang lainnya, dan nantinya akan membentuk sebuah konsep baru yang disepakati oleh bersama. Kemudian, pada komunikasi partisipatif memungkinkan timbulnya umpan balik. Suatu pesan disebut umpan balik apabila hal itu merupakan respon terhadap pesan pengirim dan bila mempengaruhi perilaku selanjutnya pengirim. Sehingga, tidak semua respon penerima pesan itu merupakan sebuah umpan balik (Mulyana, 2016). Umpan balik juga ada dua dalam komunikasi, yaitu umpan balik langsung dan umpan balik secara tidak langsung. Jika dikaitkan dengan topik penelitian umpan balik yang dimaksud adalah umpan balik langsung, yang terjadi apabila komunikator dan komunikan berhadapan langsung atau ada kemungkinan bisa

berbicara langsung (Nurudin, 2017). Jadi, komunikasi partisipatif tidak hanya sekedar berdialog dan adanya partisipasi dari semua pihak saja, melainkan hingga ke tahap perubahan perilaku setelah menerima pesan.

Penjelasan di atas juga berkaitan dengan prinsip inti dari komunikasi partisipatif yang dicetuskan oleh Tufte dan Mefalopulos (2009) yaitu terjadinya dialog yang bebas dan terbuka. Jadi, prinsip ini menjadi salah satu pedoman peneliti dalam menggambarkan komunikasi partisipatif itu sendiri. Dialog sendiri merupakan komunikasi transaksional dengan pengirim (*sender*) dan penerima (*receiver*) pesan saling berinteraksi dalam suatu periode waktu tertentu hingga sampai pada makna-makna yang saling berbagi (Syarah dan Rahmawati, 2017, h.252). Sehingga, pada prinsip tersebut memungkinkan adanya sebuah komunikasi antara para pemangku kepentingan yang dilakukan secara terbuka.

b. Komunikasi Bencana

Konsep yang kedua adalah komunikasi bencana, peneliti menggunakan teori ini karena topik penelitian yang dilakukan mengacu pada hal kebencanaan, yaitu bencana Gempa Lombok pada tahun 2018. Menurut Wardhani dalam Lestari (2018) komunikasi bencana secara umum adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan atau tindakan. Jadi pada umumnya komunikasi bencana memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kesiapsiagaan yang diperlukan dan persiapan yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Kemudian, dalam komunikasi bencana juga muncul tentang istilah manajemen komunikasi bencana, yang merupakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi tentang berbagai pesan

kebencanaan baik pada saat proses produksi pesan, penyampaian pesan, penerimaan pesan maupun pada saat pemberian respon atau umpan balik, baik pada saat prabencana, saat bencana, maupun pasca bencana dalam membentuk manusia tangguh bencana (Lestari, 2018). Sehingga, peneliti melihat bahwa komunikasi bencana menjadi bagian penting dari manajemen bencana. Sebab, pada bencana pasti akan ada masa pemulihan dan kondisi masyarakat pasca bencana akan lebih solid bila mencoba membangun manajemen bencana, agar situasi kehidupan normal dapat diciptakan dengan rentang waktu yang lebih cepat (Badri, 2018, h. 71-72).

Sama seperti program pendampingan masyarakat dari YEU bagi penyintas gempa Lombok 2018 yang lebih fokus pada kondisi pasca bencana atau yang dikenal dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Menurut Soehatman dalam Lestari (2018), rehabilitasi merupakan perbaikan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama normalisasi atau berjalannya semua aspek pemerintahan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana secara wajar. Sedangkan, rekonstruksi merupakan program jangka menengah dan jangka panjang guna perbaikan fisik, sosial, dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelumnya. Jadi, komunikasi pasca bencana juga penting untuk dilakukan demi mengembalikan masyarakat penyintas bencana pada kondisi kehidupan normal. Beberapa kegiatan seperti konseling, pemberdayaan sosial ekonomi, dan pengembalian kehidupan sosial masyarakat pasti membutuhkan pemahaman komunikasi yang baik (Lestari, 2018). Pada tahap ini,

pendekatan dan strategi komunikasi yang tepat akan mempercepat penyembuhan mental para penyintas (Rudianto, 2015, h.59). Dengan kata lain, pemilihan metode komunikasi yang tepat akan mempengaruhi berjalannya kegiatan pendampingan hingga tahap keberlanjutan program untuk seterusnya.

Pendampingan masyarakat pasca bencana akan mendorong masyarakat melakukan komunikasi sosial dengan sesama maupun dengan para pemangku kepentingan lain yang ikut berperan aktif. Seperti yang dijelaskan oleh Wilbur Schram dalam Lestari (2018), bahwa komunikasi sosial ini memiliki empat fungsi utama yang berperan penting dalam kaitannya dengan kebencanaan. Seperti komunikasi sebagai radar sosial, komunikasi sebagai manajemen, komunikasi sebagai sarana sosialisasi, dan komunikasi sebagai media hiburan. Setiap fungsi dari komunikasi tersebut menjadi acuan peneliti untuk mengkaji komunikasi bencana lebih mendalam, khususnya dalam komunikasi sosial.

c. Komunikasi Partisipatif dalam Situasi Bencana

Konsep yang ketiga adalah komunikasi partisipatif dalam situasi bencana. Peneliti dengan konsep ini ingin melihat lebih jauh tentang komunikasi partisipatif khususnya dalam situasi bencana. Salah satu aspek penting komunikasi partisipatif dalam situasi bencana adalah adanya partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat sendiri khususnya dalam situasi bencana lebih bersifat membangun kesadaran masyarakat, dimana masyarakat akan menjadi paham, siap siaga, dan terlatih dalam mengelola kerentanan, kerawanan dan risiko yang akan dihadapi (Edyanto, 2014, h.29). Sehingga dalam praktiknya partisipasi masyarakat

sangat berpengaruh dalam penanggulangan bencana, karena masyarakat yang terdampak akan bangkit dari kondisi bencana dengan cara mereka sendiri, tentu dengan kerjasama multi pihak. Hal ini menjadi sebuah konsep bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh YEU, serta melihat seberapa penting partisipasi masyarakat dalam kegiatan pasca bencana. Selain itu partisipasi masyarakat juga merupakan sebuah interaksi sosial, yang menurut Gillin dan Gillin dalam Lestari (2018), interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara orang-perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia.

Berdasarkan kerangka teori, persepsi partisipasi khususnya dalam kebencanaan, Tufte and Mefalopulos (2009) juga mengklasifikasikan menjadi empat, yaitu partisipasi pasif, partisipasi melalui konsultasi, partisipasi melalui kolaborasi, dan partisipasi pemberdayaan. Pada keempat persepsi partisipasi tersebut memiliki peran dan dampak yang berbeda satu sama lain. Tapi peneliti lebih melihat bahwa partisipasi pemberdayaan lebih tepat untuk dipersepsikan di kegiatan pendampingan masyarakat pasca bencana. Karena, partisipasi pemberdayaan lebih mengonsepan bahwa partisipasi dari masyarakat atau pemangku kepentingan utama yang akan memunculkan keputusan-keputusan yang disepakati oleh bersama, dan para pihak luar hanya merupakan mitra yang menyediakan media bagi para masyarakat melakukan dinamika bersama. Sehingga, dengan adanya konsep tersebut program yang dijalankan akan lebih mengedepankan

perspektif masyarakat atau penyintas yang akan menerima dampak langsung dari apa yang akan dilakukan.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Bagian ini peneliti akan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam melaksanakan penelitian. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Keyton (2011), metode penelitian kualitatif menekankan pendekatan empiris, induktif, dan interpretatif yang diterapkan untuk interaksi dalam konteks tertentu, ini berarti bahwa para peneliti kualitatif tertarik pada keseluruhan fenomena, terlepas dari seberapa kompleks atau berantakannya hal itu. Kemudian, penelitian kualitatif mengambil kerangka yang lebih subyektif dalam proses penelitian karena harus bergantung pada peserta penelitian untuk memahami konteks interaksi (Keyton, 2011). Proses riset kualitatif melibatkan berbagai pertanyaan dan prosedur yang harus dilakukan. Data terkumpul dari “setingan” partisipan, dan dari data yang terkumpul akan dilakukan penganalisisan data induktif yang dibangun secara fleksibel struktur laporannya. Penulis akan membuat laporan berdasar cara pandang penelitian yang menekankan gaya induktif, yang memokuskan amatan pada pemaknaan individual, dan kompleksitas situasi yang terjadi dan teramati (Santana, 2010).

Penelitian ini diajukan untuk menganalisis dan mengungkapkan komunikasi partisipatif yang dijalankan YAKKUM Emergency Unit dalam program pendampingan masyarakat bagi para penyintas gempa Lombok 2018. Jadi, peneliti

memilih menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk lebih menjelaskan fenomena secara lebih mendalam. Jenis penelitian deskriptif kualitatif lebih mengacu pada memberikan deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat melalui gambaran situasi, kondisi, serta berbagai fenomena realitas sosial di tengah masyarakat yang menjadi objek penelitian (Kriyantono, 2006).

2. Metode Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah Fenomenologi. Menurut Bertens dalam Hasbiansyah (2008), fenomenologi merupakan sebuah ilmu mengenai sesuatu yang tampak. Jadi, setiap penelitian atau setiap karya yang membahas cara penampakan dari apa saja merupakan fenomenologi. Kemudian, menurut Edgar dan Sedgwick dalam Hasbiansyah (2008), fenomenologi juga berupaya mengungkapkan tentang makna dari pengalaman seseorang. Makna tentang sesuatu yang dialami seseorang akan sangat tergantung bagaimana orang berhubungan dengan sesuatu itu (Hasbiansyah, 2008, h.166). Fenomenologi berangkat dari berbagai pertanyaan yang ditujukan untuk mencari pemaknaan pada sesuatu yang diamati peneliti yang tergerak untuk merasakan apa yang terjadi selama mengalami pengalaman fenomena tertentu (Santana, 2010). Maka dalam penelitian ini ingin melihat sebuah realitas sesuai dengan apa yang terjadi dan dialami oleh subjek penelitian. Peneliti akan menggali lebih dalam tentang bagaimana komunikasi partisipatif dijalankan dalam masa pendampingan masyarakat yang dilakukan YAKKUM Emergency Unit terhadap para peyintas gempa Lombok 2018 sesuai dengan apa yang dilakukan dan diungkapkan oleh

subjek penelitian. Selain itu, metode fenomenologi berupaya untuk membiarkan realitas mengungkapkan dirinya secara alami (Hasbiansyah, 2008, h.170). Sehingga, pengalaman dan interpretasi dari subjek penelitian selama melakukan pendampingan masyarakat akan mengungkapkan realitas yang terjadi sebenarnya.

3. Subyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa subyek penelitian yang bersentuhan langsung dengan program pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh YAKKUM Emergency Unit. Subjek yang dipilih dalam penelitian ini adalah para penyintas gempa Lombok 2018 yang mendapat intervensi dari program pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh YEU. Beberapa masyarakat yang terlibat aktif dalam pelaksanaan program akan dipilih peneliti untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Kemudian, selain dari masyarakat, peneliti juga menggunakan beberapa pihak dari YAKKUM Emergency Unit sebagai pelaksana program untuk menggali data lebih dalam pada penelitian ini. Pertama adalah Manager HRD YAKKUM Emergency Unit yang sekaligus menjadi fasilitator dalam kegiatan-kegiatan pendampingan masyarakat pasca gempa Lombok 2018 yang dilakukan oleh YAKKUM Emergency Unit. Berdasarkan perannya, karena menjadi fasilitator, maka dia yang berinteraksi dan bersentuhan langsung dengan para penyintas. Selain Manager HRD yang menjadi fasilitator, pada program pendampingan masyarakat YEU terdapat *community organizer* yang merupakan staff YEU yang bertugas menjadi pendamping masyarakat, sehingga *community organizer* ini yang setiap hari berinteraksi dengan para penyintas, dan

juga sering membantu para fasilitator apabila ada kegiatan-kegiatan spesifik, seperti pelatihan-pelatihan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik utama pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan wawancara mendalam dengan subjek penelitian. Wawancara sendiri merupakan suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung (Yusuf, 2017). Sedangkan, wawancara mendalam merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Wawancara mendalam yang dilakukan juga dipersiapkan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya (Moleong, 2007). Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara bersama empat orang narasumber yang merupakan subjek penelitian. Wawancara bersama pihak lembaga dilakukan bersama Helena Sigit selaku fasilitator pada saat program pendampingan YEU gempa Lombok 2018. Kedua adalah Mengty Dese Benu selaku *Community Organizer* pada saat program pendampingan gempa Lombok 2018. Kemudian, untuk mengkonfirmasi hasil dari pertanyaan dari pihak lembaga, peneliti juga melakukan wawancara bersama dua orang penyintas yang sekaligus menjadi penerima manfaat dari program pendampingan YEU. Pertama adalah Mariati yang berasal dari Dusun Batu Rakit, Lombok Utara dan Saroan yang berasal dari Dusun Lendang Cempaka, Lombok Utara.

Sebagai pendukung data yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan subjek penelitian, observasi partisipan dan studi dokumen akan dilakukan dalam penelitian ini. Menurut Morris dalam Hasanah (2016), observasi merupakan aktivitas mencatat suatu gejala dengan bantuan instrumen-instrumen dan merekamnya dengan tujuan ilmiah atau tujuan lain, lebih lengkapnya observasi merupakan kumpulan kesan tentang dunia sekitar berdasarkan semua kemampuan daya tangkap panca indera manusia (Hasanah, 2016, h.26). Sedangkan observasi partisipan sendiri lebih kepada orang yang mengadakan observasi turut ambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang diobservasi (Hasanah, 2016, h.36). Hal ini akan membantu peneliti dalam mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian, dan karena peneliti juga terjun langsung dalam kegiatan pendampingan masyarakat penyintas gempa Lombok 2018 oleh YEU sebagai *community organizer* atau sebagai pendamping masyarakat. Peneliti selama enam bulan menjadi bagian dari program pendampingan yang dilakukan oleh YEU.

Ketiga adalah studi dokumen, menurut Sugiyono dalam Nilamsari (2014), studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif, bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif akan semakin tinggi jika melibatkan atau menggunakan studi dokumen dalam metode penelitian kualitatifnya (Nilamsari, 2014, h.179). Peneliti menggunakan foto dokumentasi pribadi dan dokumentasi lembaga sebagai pendukung dari data yang diperoleh. Studi dokumen yang dilakukan adalah untuk melihat rekam jejak kegiatan yang telah dilakukan oleh YEU.

Ketiga teknik pengumpulan data ini akan saling berhubungan dan saling melengkapi satu sama lain. Hal ini juga berkaitan dengan kevalidan data yang dikumpulkan, ketiga teknik ini digunakan juga untuk *crosscheck* agar data yang didapatkan dapat dipertanggungjawabkan kevalidannya.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2016), analisis data merupakan sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2016). Berdasarkan Sugiyono (2016), analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari subjek penelitian. Jika jawaban setelah dianalisis dirasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai diperoleh data yang kredibel. Kemudian, Miles and Huberman dalam Sugiyono (2016), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* (Sugiyono, 2018).

Pertama adalah *data reduction* atau reduksi data, pada bagian ini mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang diperoleh dan

telah direduksi akan lebih fokus dan lebih memberi gambaran yang jelas terkait dengan data-data penting yang diperlukan dalam penelitian ini. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh sebab itu, apabila peneliti dalam melakukan penelitian menemukan sesuatu yang asing dan baru, penemuan data yang nantinya akan direduksi (Sugiyono, 2016).

Kedua adalah *data display* atau penyajian data, bagian ini merupakan tahap setelah reduksi data. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman dalam Sugiyono (2016) mengatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Tujuan dari menyajikan data adalah untuk memudahkan memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami (Sugiyono, 2016).

Ketiga adalah *conclusion drawing/verification* atau penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih tidak jelas setelah diteliti menjadi jelas. Penyajian data pada tahap sebelumnya apabila didukung dengan data-data yang memadai maka dapat dijadikan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2016). Pada tahap ini menjelaskan bahwa peneliti akan menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.